

BAB III
GAMBARAN DAN PERSOALAN-PERSOALAN
KETENAGAKERJAAN LUAR NEGERI INDONESIA
PERIODE 2009-2013

Periode 2009-2013 merupakan masa penting bagi dinamika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri. Pada periode tahun tersebut sektor buruh migran (TKI) masih menjadi sektor unggulan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga dengan lebih baik. Pada kenyataannya para TKI dihadapkan pada berbagai persoalan, baik secara teknis, administratif ataupun persoalan yang lebih parah, diantaranya kekerasan hingga penyiksaan.

Pada tahun 2009-2013 berbagai persoalan TKI masih menjadi isu yang mengemuka dan ternyata persoalan ini belum dapat diselesaikan secara mendasar oleh pemerintah Indonesia. Pada bab III ini akan diuraikan lebih lanjut tentang perkembangan ketenagakerjaan luar negeri Indonesia dan berbagai persoalan yang menyertainya, khususnya pada periode 2009-2013

A. Gambaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Indonesia dikenal sebagai negara penghasil TKI yang besar di dunia. Banyak masyarakat Indonesia memutuskan menjadi TKI ke negara tetangga, seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Hongkong dan beberapa negara lainnya. Pada dasarnya,

masyarakat Indonesia memilih menjadi TKI dan meninggalkan wilayah asalnya telah didasarkan perbandingan untung rugi jika tetap berada di daerah asal dan berada di daerah tujuan. Faktor pertimbangan untung rugi tersebut didasarkan pada 2 faktor yaitu karena adanya faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull faktor).

Faktor pendorong yang mendasar adalah banyaknya kemiskinan. Kemiskinan tersebut bisa dikarenakan karena rendahnya kualitas SDM yang ada sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi ataupun kurangnya potensi di SDA di wilayah tersebut. Kurangnya SDM dikarenakan minimnya pendidikan dan tidak adanya potensi SDA yang ada di wilayah tersebut mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Sedangkan untuk faktor penarik (pull factor) dari migrasi adalah peluang kerja yang terbuka lebar di daerah tujuan sehingga memberi kesempatan bagi para TKI untuk memperbaiki taraf hidup, serta lengkapnya sarana dan prasarana di daerah tujuan.³⁵

Banyaknya TKI ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Pengaruh yang diberikan bisa dampak positif ataupun negatif. Dampak positif dari banyaknya TKI di Indonesia, antara lain:

1. Memperbaiki taraf ekonomi individu yang melakukan migrasi.
2. Meningkatkan perekonomian keluarga yang ditinggalkan dengan adanya pengiriman uang (remittances) dari para TKI.

³⁵ "Total Diplomasi Untuk TKI", dalam <http://unimig.org/ikuti-lomba-video-internasional-unimig-angkat-kisah-sukses-tki/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

3. Dapat meningkatkan siklus perekonomian wilayah. Hasil pengiriman uang (remittances) dari para TKI bisa digunakan keluarga di daerah asal untuk membuka usaha kerja sehingga bisa meningkatkan perekonomiannya.
4. Berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah yang ditinggalkan.
5. Meningkatnya pembangunan di wilayah yang ditinggalkan.
6. Membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah yang ditinggalkan. Dari hasil pengiriman uang (remittance) bisa digunakan untuk membuka usaha baru yang bisa menarik tenaga kerja.
7. Meningkatnya taraf pendidikan, baik para TKI ataupun keluarga yang ditinggalkan. Hasil pengiriman uang (remittance) bisa digunakan keluarga untuk membiayai anggota keluarga yang akan menempuh pendidikan sehingga bisa memiliki pendidikan yang baik.

Dampak positif bagi wilayah yang ditinggalkan, dampak positif adanya TKI juga dirasakan oleh negara. Selain mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya daerah asal, TKI juga merupakan sumber devisa yang besar bagi negara. Devisa tersebut didapat dari pengiriman uang (remittances) yang dilakukan oleh para TKI. Berdasarkan data Depnakertrans terlihat bahwa peningkatan jumlah pengiriman uang (remittances) serta devisa yang didapatkan semakin meningkat.

Berbagai tawaran yang menarik dari aspek materi yang sangat menguntungkan kemudian menjadikan jumlah TKI dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2006-2013

No.	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1.	2006	680.000
2	2007	696.746
3.	2008	561.105
4.	2009	632.172
5.	2010	575.804
6.	2011	688.743
7.	2012	589.559
8.	2013	661.203

Sumber : "Profil Penempatan Tenaga Kerja Indonesia", dalam <https://docs.google.com/file/d/0B9zVxTquSWwdOnUwVFireHIOYONaT29JSDBFVnpOS3l1ZkZJZ/edi?pli=1>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

Tabel 3.1. dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2006 hingga 2013 perkembangan TKI rata-rata berada pada angka di atas 500 ribu orang, baik TKI laki-laki ataupun perempuan. Angka tertinggi tercapai pada tahun 2007 yaitu berjumlah 696.746, sedangkan angka terendah adalah pada tahun 2008 sebanyak 561.505 orang.

Kemudian negara-negara tujuan TKI pada tahun 2011/2012 dapat dilihat pada tabel

3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Negara Tujuan Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2011/2013

No.	Nama/Peringkat	Jumlah (Jiwa)
1.	Malaysia	150.296
2.	Taiwan	58.664
3.	Arab Saudi	31.554
4.	Uni Emirat Arab	28.998
5.	Hongkong	8.120
6.	Singapura	7.899
7.	Qatar	6.723
8.	Korea Selatan	6.081
9.	Amerika Serikat	4.120
10.	Brunei Darusallam	1.225

Sumber : "Profil Penempatan Tenaga Kerja Indonesia", dalam <https://docs.google.com/file/d/0B9zVxTquSWwdQnUwVFfreHI0Y0NaT29JSDBFVnpOS311ZkZJ/edi t?pli=1>, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

Melalui tabel 3.2. maka dapat diketahui tentang negara-negara tujuan TKI di dunia. Dari tahun 2002 peringkat negara tersebut bersifat tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Peringkat pertama di duduki oleh Malaysia, disusul oleh Taiwan dan Arab Saudi. Pada kenyataannya banyaknya jumlah TKI tersebut ternyata menimbulkan berbagai persoalan yang menyebabkan kerugian bagi TKI sendiri. Keberadaan TKI yang tersebar di berbagai negara dunia dihadapkan pada berbagai

persoalan, baik pelanggaran hak-hak pekerja, kekerasan, intimidasi dan berbagai persoalan lainnya. Gambaran mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para TKI tersebut akan dibahas pada sub-bab sebagai berikut.

B. Persoalan-persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Persoalan-persoalan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia ternyata telah berkembang dengan sedemikian kompleks. Beberapa diantaranya terjadi akibat pengetahuan dari para TKI sendiri yang relatif terbatas sehingga memunculkan berbagai persoalan di kemudian hari, baik saat masih di Indonesia, saat bekerja di luar negeri ataupun pada proses pemulangannya. Beberapa persoalan yang menimpa TKI antar lain yaitu :³⁶

1. Buruh migran dan keluarganya tidak memiliki akses untuk memberi dan mendapatkan informasi tentang kepulangan, terutama buruh migran yang bermasalah seperti putus kontrak, sakit, dan mengalami kekerasan saat bekerja.
2. Sejumlah buruh migran hanya dapat ongkos transportasi hanya sampai Jakarta (tak sampai rumah) sehingga terkatung-katung untuk bisa pulang. Tak sedikit buruh migran diusir oleh majikan tanpa dukungan transportasi dan akomodasi ke tanah air.

³⁶ Laporan, "Persoalan Umum Tenaga Kerja Indonesia", BNP2TKI, Jakarta, 2012, hal.9.

3. Buruh migran acapkali tidak diberitahu soal pemutusan visa kerja oleh majikan sehingga tak menyadari izin tinggal di luar negeri habis, bahkan tak sedikit buruh migran harus membayar denda overtstay dengan mahal.
4. Buruh migran tidak memiliki pengetahuan cukup tentang lokasi, layanan, dan cara menghubungi konsulat atau KBRI saat akan pulang.
5. Banyak buruh migran yang tertipu oleh majikan dengan modus operandi gaji akan dibayar setelah mereka pulang ke Indonesia. Para majikan sering ingkar janji untuk transfer gaji dan buruh migran sulit untuk mengurus permasalahan tersebut.
6. Buruh migran sering manejadi korban pemerasan dengan modus operandi uang jasa pengurusan izin keluar dari negara tertentu, baik di pelabuhan maupun bandara. Peristiwa ini sering terjadi di negara Malaysia dan Singapura.
7. Buruh migran mengalami perlakuan diskriminasi dengan diperlakukan berbeda dari dari warga negara Indonesia lainnya saat tiba di bandara, bahkan pemerintah mengarahkan mereka ke terminal khusus buruh migran di Bandara Jakarta dan Surakarta. Di terminal khusus TKI, buruh migran mengalami tindak pemerasan dengan modus operandi jasa angkat barang, tiket lebih mahal, harga makanan dan produk jasa lainnya mahal.

8. Buruh migran harus pulang ke rumah menggunakan angkutan khusus dengan harga tiket yang mahal. Bila kuota penumpang lebih sedikit dari kuota kursi angkutan, mereka harus menunggu tanpa ada informasi atau kejelasan waktu tunggu. Saat menunggu tidak ada layanan tempat istirahat atau tidur, layanan kesehatan tidak layak, dan kamar yang menjaga privasi bagi perempuan.
9. Bila buruh migran tak ingin diarahkan ke terminal khusus TKI, mereka bisa menggunakan jasa petugas di terminal 2 dengan membayar sejumlah uang jasa.
10. Buruh migran sering mengalami praktik pemerasan di perjalanan dengan modus operandi mereka diarahkan ke restoran tertentu untuk menukar mata uang, meminta uang jasa antar di dalam travel maupun pada keluarga bahkan tak sedikit terjadi pelecehan seksual oleh pihak travel. Di Lombok, buruh migran masih harus membayar jasa antar polisi dari pool Damri ke rumah
11. Pemerasan dengan modus penebusan dokumen-dokumen penting, seperti ijasah, akte kelahiran, KTP. Biasanya praktik ini dilakukan oleh PTKIS dengan alasan jaminan saat keberangkatan.
12. Tidak ada akses mendapatkan informasi bahwa ada layanan asuransi untuk setiap TKI, tidak mengetahui prosedur klaim asuransi, klaim asuransi sangat sulit, pengurusan asuransi harus ke Jakarta. Anak Buah Kapal (ABK) banyak yang tidak diasuransikan dan bila ABK bermasalah belum ada peraturan dan

perundangan yang melindunginya. Hal itu diperumit dengan tidak jelasnya kontrak layanan asuransi karena berhubungan dg Konsorsium Proteksi

13. Perlakuan diskriminasi dengan labelisasi secara khusus pada terminal, kendaraan, dan layanan lain TKI.

Selain persoalan-persoalan tersebut terdapat problematika lainnya, masing-masing adalah :

1. Kekerasan Kepada TKI

Persoalan tentang kekerasan ternyata berkaitan dengan posisi pekerja yang dinggap rendah. Selain itu, tindakan para majikan yang cenderung agresif dan memposisikan kelompok pekerja sebagai pekerjaan yang rendah juga melatarbelakangi terjadinya persoalan ini. Beberapa kasus kekerasan kepada TKI yang terjadi antara lain :³⁷

- a. Penyiksaan secara fisik yang menyebabkan luka atau cedera yang fatal. Persoalan ini menimpa beberapa TKI di Indonesia yang menyebabkan diantaranya mendapatkan pendeportasian ke tanah air dengan kebijakan penyelesaian yang belum jelas.
- b. Pengurangan sehingga para TKI terbatas dalam segala aktifitasnya. Persoalan ini juga menimpa sebagian TKI di luar negeri, dimana para majikan atau

³⁷ "TKI Masih Menjadi Kelompok Yang Rentan", *Kompas*, 8 Juni 2011.

pemilik usaha mengurung para TKI untuk memperoleh output pekerjaan yang lebih besar ataupun dengan sengaja mengisolasi dari pergaulan lingkungan.

- c. Pelarangan atau pembatasan terhadap akses makanan dan bahan-bahan pokok. Kasus ini terjadi karena sebagian majikan atau pemilik usaha dengan sengaja tidak memberikan hak-hak para TKI untuk mengejar keuntungan yang maksimal secara sepihak.
- d. Pelarangan atau pembatasan terhadap akses komunikasi. Kasus ini lazim menimpa para TKI, dimana upaya ini ditujukan untuk mengisolasi para TKI ataupun mendapatkan output pekerjaan yang lebih besar.

Salah satu contoh kasus kekerasan yang menjadi perhatian dalam pemerintah adalah kasus Sumiyati sangat memprihatinkan. Hampir seluruh bagian tubuh, wajah, dan kedua kakinya mengalami luka-luka. Media massa setempat memberitakan Sumiati mengalami luka bakar di beberapa titik, kedua kaki nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepala terkelupas, jari tengah tangan retak, alis mata rusak. Paling mengesankan, adalah bagian atas bibir putus. Pemerintah Indonesia menyebut perbuatan majikan Sumiati sangatlah tidak berperikemanusiaan. Karena itu, Kemlu telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta, Abdulrahman Mohammad Amen Al Khayyat. Dalam pertemuan itu, Kemlu mendesak pemerintah Arab Saudi untuk membawa pelaku ke pengadilan.³⁸

³⁸ "Potret Kelam TKI di Malaysia", dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/potret-kelam-tki-di-malaysia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2014.

Kemudian kasus lainnya menimpa TKI bernama Siti Hajar misalnya. Wanita berusia 33 tahun ini disiksa majikannya di Malaysia, Michele, pada 7 Juni 2009, hingga mengalami luka parah. Dalam proses pengadilan di negeri jiran itu Michele terbukti menyiram Siti dengan air panas, menyiksa dengan martil dan gunting hingga menyebabkan cacat permanen pada tubuh Siti. Meski sang majikan divonis delapan tahun penjara, namun hal itu tak memadamkan kemarahan masyarakat Indonesia. Akhirnya, pada Juni 2009, Pemerintah RI menerapkan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI sektor informal ke Malaysia, kemudian dibuka kembali pada Desember 2011.³⁹

Kasus lainnya juga menimpa Modesta Rengga Kaka disiksa oleh majikannya, Choo Pei Ling hingga menderita luka di sejumlah bagian badan Modesta. Selain disiksa secara fisik, Modesta juga tidak diberikan makanan yang layak, dipekerjakan di dua rumah melebihi jam kerja yang sepatutnya, tidak diberikan waktu istirahat dan tempat untuk tidur yang layak.

Pada 2010 seorang TKI bernama Nurul Aidah ditemukan tewas dalam bagasi mobil majikannya. Dari hasil otopsi ditemukan lebam-lebam pada tubuh pembantu asal Bogak, kabupaten Batubara, Sumatera Utara itu, akibat pukulan benda tumpul, sehingga kematian Nurul diduga akibat kekerasan majikan. Akibat kejadian itu, kedua majikan Nurul, yakni Krishnan dan Lechumi serta anaknya, dan agen Too dan dua kawannya ditahan polisi Malaysia. Tak hanya itu, aksi kekerasan disertai

³⁹ *Ibid.*

pemeriksaan oleh majikan terungkap pada September 2010. Kali ini menimpa seorang TKI asal Lampung, Winfaidah (26). Korban disiksa dengan disiram air panas dan disetrika tubuhnya. Tak hanya itu, korban juga diperkosa berulang kali oleh majikannya.

Perkembangan kekerasan kepada TKI ternyata berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2009 hingga 2013 ternyata perkembangannya cenderung naik turun. Gambaran tentang hal; ini dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Kasus Kekerasan Terhadap TKI
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2009	89
2.	2010	125
3.	2011	118
4.	2012	110
5.	2013	118

Sumber : Laporan, "Persoalan Umum Tenaga Kerja Indonesia", BNP2TKI, Jakarta, 2012, hal.14.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa persoalan mengenai kekerasan yang menimpa TKI Indonesia masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan secara mendasar. Dari tabel 3.3. di atas maka pada tahun 2010 jumlah kasus kekerasan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah yang terendah adalah pada tahun 2009.

2. Pelanggaran Hak Kepada TKI

Pelanggaran hak TKI merupakan persoalan selanjutnya yang dialami oleh para pejuang devisa Indonesia. Beberapa problematika yang masuk dalam pelanggaran hak TKI, antara lain adalah :

- a. Pengurangan atau penolakan pembayaran upah kepada para TKI. Kasus ini merupakan persoalan yang lazim menimpa para TKI di luar negeri, dimana biasanya di negara tujuan para majikan menolak ketentuan pembayaran baik secara nominal ataupun waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Pekerjaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan perjanjian. Kasus ini lazim terjadi pada pekerja non-formal, antara lain para TKI yang bekerja restoran atau pembantu ruma tangga yang dipekerjakan pada pekerjaan di luar kesepakatan atau waktu bekerja yang berlebihan.
- c. PHK secara sepihak. Persoalan ini lazim terjadi akibat benturan kepentingan baik dari pihak pekerja sendiri ataupun majikan/pemilik usaha sehingga para TKI tidak dapat lagi memperoleh hak-haknya sesuai dengan kesepakatan yang belaku.

Perkembangan pelanggaran kepada TKI ternyata berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2009 hingga 2013 ternyata perkembangannya cenderung naik turun. Gambaran tentang hal; ini dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Kasus Pelanggaran Hak Terhadap TKI
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2009	681
2.	2010	772
3.	2011	420
4.	2012	552
5.	2013	571

Sumber : Laporan, "Persoalan Umum Tenaga Kerja Indonesia", BNP2TKI, Jakarta, 2012, hal.14.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa persoalan mengenai pelanggaran hak TKI yang menimpa TKI Indonesia masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan secara mendasar. Dari tabel 3.3. di atas maka pada tahun 2010 jumlah kasus pelanggaran hak TKI mengalami peningkatan, sedangkan jumlah yang terendah adalah pada tahun 2011.

Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa keberadaan TKI menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia. Secara fakta sektor ini mampu berperan sebagai penopang perekonomian sebagian keluarga-keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi devisa dengan jumlah yang besar bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ini

kemudian mendorong BNP2TKI untuk menjalankan perannya, yaitu fungsi publikasi, advokasi, mediasi dan dukungan kerjasama luar negeri. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab IV).